

Analisis Tata Kelola Pendataan dan Verifikasi Keluarga Sasaran oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam Penanggulangan Stunting di Desa Srimenanti Lampung Timur

Rizka Azizah Yunita Lauren

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Terbuka

Email: 049366243@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan *stunting* masih menjadi isu penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena berkaitan dengan kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat, sehingga diperlukan tata kelola pendataan dan verifikasi yang akurat untuk memastikan ketepatan sasaran program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pendataan serta proses verifikasi keluarga sasaran oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam penanggulangan *stunting* di Desa Srimenanti, Lampung Timur. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendataan telah dilakukan secara aktif melalui kunjungan langsung dan pemantauan posyandu, dengan jumlah keluarga sasaran sekitar 52 keluarga, namun masih menghadapi kendala seperti ketidakkonsistenan indikator, keterbatasan kapasitas kader, serta belum optimalnya sistem pendataan. Proses verifikasi juga telah dilakukan, dengan sekitar 70% data diverifikasi secara langsung, tetapi belum sepenuhnya menyeluruh karena keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, dan belum terintegrasinya sistem data. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas KPM, pengembangan sistem berbasis digital, serta peningkatan koordinasi dan pendekatan sosial agar data yang dihasilkan lebih akurat dan program dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: KPM, pendataan, *stunting*, tata kelola, verifikasi.

PENDAHULUAN

Permasalahan *stunting* hingga saat ini masih menjadi isu strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, karena dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada kualitas pendidikan, produktivitas, serta daya saing bangsa dalam jangka panjang. Secara konseptual, *stunting* dipahami sebagai kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam periode waktu yang lama, khususnya pada fase 1.000 hari pertama kehidupan yang sangat menentukan perkembangan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan *stunting* tidak dapat dipandang secara sempit sebagai masalah medis semata, melainkan harus dilihat sebagai persoalan multidimensi yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, akses layanan kesehatan, serta kualitas tata kelola pembangunan (Arifin, Z. 2022). Oleh karena itu, upaya penanggulangan *stunting* menuntut pendekatan yang sistematis, terintegrasi, serta berbasis data yang akurat agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan efektif. (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam menurunkan angka *stunting* melalui berbagai program nasional yang dirancang secara lintas sektor (Nugroho, R. 2021). Salah satu pendekatan yang digunakan adalah kebijakan konvergensi percepatan penurunan *stunting* yang menekankan integrasi antara intervensi spesifik dan sensitif yang dilakukan secara bersamaan. Pendekatan ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat di tingkat desa sebagai pelaksana langsung di lapangan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan kualitas data keluarga sasaran yang menjadi dasar dalam penentuan penerima manfaat program. Ketidaktepatan data berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyaluran program sehingga tujuan kebijakan tidak dapat tercapai secara optimal. (Bappenas, 2021).

Jika dilihat dari perspektif administrasi publik, tata kelola data merupakan bagian penting dari prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Wibawa, S. 2020). Tata kelola pendataan tidak hanya berkaitan dengan proses pengumpulan data, tetapi juga mencakup tahap verifikasi, validasi, serta pemutakhiran data secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan kondisi aktual di lapangan. Dalam konteks program penanggulangan *stunting*, kualitas tata kelola data menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena data yang tidak akurat akan berdampak langsung pada ketidaktepatan sasaran intervensi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pendataan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Sedarmayanti, 2020).

Di tingkat desa, peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) menjadi sangat penting sebagai pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan masyarakat. KPM memiliki tugas utama dalam melakukan pendataan, pemantauan, serta verifikasi keluarga yang berisiko mengalami *stunting*, sehingga keberadaan mereka menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa program yang dijalankan dapat tepat sasaran (Hidayat, T., et al. 2022). Namun dalam praktiknya, peran strategis tersebut seringkali belum didukung oleh kapasitas yang memadai, baik dari sisi keterampilan teknis maupun pemahaman terhadap sistem pendataan yang berbasis teknologi. Selain itu, keterbatasan pelatihan dan minimnya dukungan sarana juga menjadi kendala yang memengaruhi kualitas data yang dihasilkan oleh KPM di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara peran ideal KPM dengan realitas pelaksanaan tugas di tingkat desa. (Kementerian Desa PDTT, 2021).

Fenomena yang terjadi di lapangan juga menunjukkan bahwa proses pendataan dan verifikasi keluarga sasaran belum sepenuhnya berjalan secara optimal, terutama dalam hal konsistensi dan integrasi data antar instansi (Kurniawan, A., et al. 2023). Data yang dimiliki oleh pemerintah desa seringkali tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh instansi lain, seperti dinas kesehatan atau dinas sosial, sehingga menimbulkan perbedaan dalam penentuan sasaran program (Wahyuni, S., & Kurniawan, B. 2024). Selain itu, proses verifikasi yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh terkadang hanya dilakukan secara

administratif tanpa pengecekan langsung di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola data masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung efektivitas program secara maksimal. (Rahman et al., 2021).

Desa Srimenanti sebagai salah satu wilayah yang menjadi bagian dari program penanggulangan *stunting* juga menghadapi kondisi yang serupa, di mana proses pendataan dan verifikasi telah dilakukan, namun masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi kualitas hasilnya. Keterbatasan pemanfaatan teknologi digital, kurang optimalnya koordinasi antar pihak, serta masih adanya potensi kesalahan data menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program di tingkat desa. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh KPM dan pemerintah desa tetap menunjukkan adanya komitmen dalam mendukung program nasional, sehingga perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana tata kelola pendataan dan verifikasi tersebut telah berjalan secara efektif. (BPS, 2022).

Dalam kajian teoritis, kualitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh keakuratan data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Putri, M., et al. 2021). Data yang valid dan reliabel akan mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal (Sulaiman, R., et al. 2022). Sebaliknya, data yang tidak akurat akan menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penentuan sasaran, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya efektivitas program yang dijalankan. Oleh karena itu, pendataan dan verifikasi harus dipahami sebagai bagian integral dari proses manajemen kebijakan publik yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat. (Mardiasmo, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tata kelola pendataan dan verifikasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program penanggulangan *stunting*. Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dengan praktik di lapangan, khususnya di tingkat desa. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting bagi dilakukannya penelitian ini, dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana tata kelola pendataan dan verifikasi keluarga sasaran oleh KPM di Desa Srimenanti, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya perbaikan kualitas tata kelola program penanggulangan *stunting* di masa yang akan datang. (Yuliana & Hidayat, 2024).

Sejalan dengan uraian latar belakang tersebut, kajian mengenai tata kelola pendataan dan verifikasi dalam program penanggulangan *stunting* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, meskipun dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Lestari (2022) menunjukkan bahwa peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pendataan keluarga berisiko *stunting* memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ketepatan sasaran program, namun masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas kader dan kurangnya pelatihan teknis yang berkelanjutan. Hasil

penelitian ini menekankan bahwa peningkatan kompetensi KPM menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas data yang dihasilkan.

Selanjutnya, penelitian oleh Rahman et al. (2021) mengkaji integrasi data dalam program penanggulangan *stunting* di tingkat daerah, yang menemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data antar instansi, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan data antara pemerintah desa dan instansi teknis lainnya. Kondisi ini berdampak pada ketidaktepatan sasaran program dan menurunkan efektivitas intervensi yang diberikan kepada masyarakat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho (2023) lebih menyoroti aspek tata kelola data berbasis digital dalam program *stunting*, di mana hasilnya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan akurasi dan kecepatan pengolahan data, namun implementasinya masih belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam tata kelola data masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi.

Selain itu, penelitian oleh Handayani dan Putra (2022) mengungkap bahwa proses verifikasi data keluarga sasaran seringkali tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga masih ditemukan ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi riil di lapangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya proses verifikasi yang berbasis observasi langsung untuk memastikan validitas data yang digunakan dalam program penanggulangan *stunting*.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Hidayat (2024) juga menunjukkan bahwa keberhasilan program penanggulangan *stunting* sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola data yang mencakup aspek pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data secara berkala. Namun demikian, penelitian ini lebih menekankan pada aspek kebijakan secara umum dan belum secara spesifik mengkaji peran aktor lokal seperti KPM dalam proses tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek umum tata kelola data, integrasi sistem, serta pemanfaatan teknologi dalam program penanggulangan *stunting*, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis tata kelola pendataan dan verifikasi keluarga sasaran oleh KPM di tingkat desa masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus kebaruan dengan menempatkan KPM sebagai fokus utama analisis, khususnya dalam melihat bagaimana proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara langsung di tingkat desa, serta mengkaji secara mendalam kondisi empiris di Desa Srimenanti, Lampung Timur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik, tetapi juga menawarkan perspektif praktis yang lebih kontekstual dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan *stunting* berbasis tata kelola data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan utama yang berkaitan dengan tata kelola data dalam program penanggulangan *stunting* di

tingkat desa, khususnya peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai pelaksana di lapangan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah **1).** Bagaimana tata kelola pendataan keluarga sasaran dilakukan oleh KPM di Desa Srimenanti ?. **2).** Bagaimana proses verifikasi data keluarga sasaran dilakukan oleh KPM dalam memastikan keakuratan dan ketepatan sasaran program penanggulangan *stunting*, serta sejauh mana proses tersebut mampu mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan ?.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tata kelola pendataan keluarga sasaran yang dilakukan oleh KPM di Desa Srimenanti, dengan menekankan pada proses, mekanisme, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji proses verifikasi data keluarga sasaran yang dilakukan oleh KPM dalam mendukung ketepatan sasaran program penanggulangan *stunting*, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitasnya serta faktor-faktor yang memengaruhi kualitas verifikasi data tersebut dalam konteks implementasi kebijakan di tingkat desa. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik khususnya terkait tata kelola pendataan dan verifikasi dalam program penanggulangan *stunting*, serta sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah desa dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam meningkatkan kualitas pendataan, verifikasi, dan ketepatan sasaran program di Desa Srimenanti, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

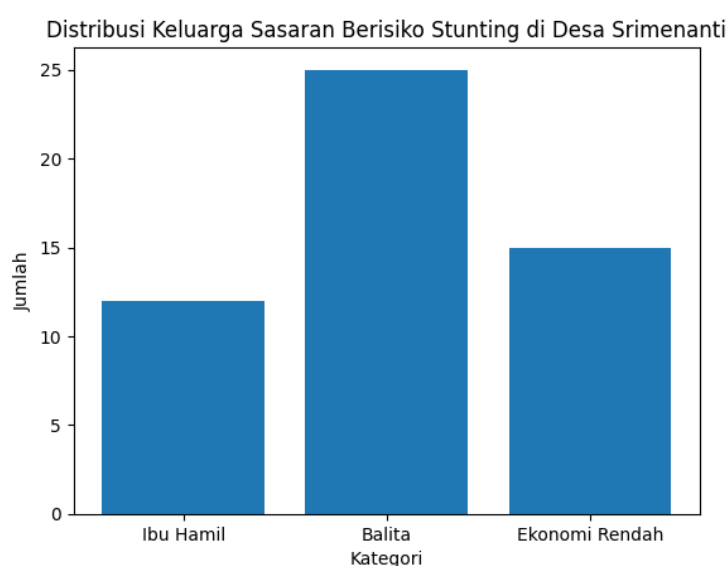
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tata kelola pendataan dan verifikasi keluarga sasaran oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam penanggulangan *stunting* di Desa Srimenanti, Lampung Timur. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara utuh berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan KPM, perangkat desa, dan keluarga sasaran, serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi, laporan desa, dan kebijakan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tata Kelola Pendataan Keluarga Sasaran oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa Srimenanti, Lampung Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Srimenanti, diperoleh gambaran bahwa tata kelola pendataan keluarga sasaran dalam penanggulangan *stunting* telah dilaksanakan secara aktif, namun kualitas pelaksanaannya masih menunjukkan variasi di lapangan. Secara umum, pendataan dilakukan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) dengan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kunjungan rumah (*door to door*) dan pemantauan kegiatan posyandu. Dari hasil observasi dan wawancara, tercatat bahwa terdapat sekitar **52 keluarga sasaran** yang masuk dalam kategori berisiko *stunting*, yang terdiri dari ibu hamil, balita, serta keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Pendataan ini dilakukan secara berkala, rata-rata setiap **3 bulan sekali**, serta diperbarui ketika terdapat perubahan kondisi keluarga seperti kelahiran, perpindahan penduduk, atau perubahan status ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa secara prosedural, pendataan telah berjalan, namun belum sepenuhnya ditopang oleh sistem yang kuat dan terstandarisasi.

Gambar 1. Distribusi Keluarga Sasaran Berisiko Stunting di Desa Srimenanti



Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2026

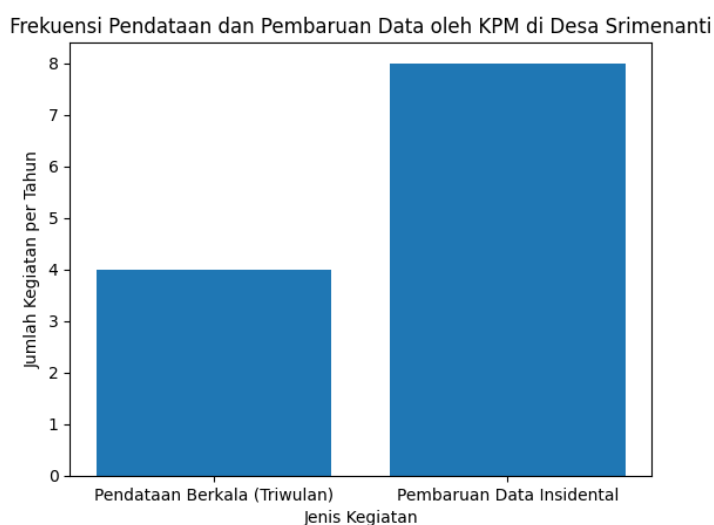
Diagram batang di atas menunjukkan bahwa mayoritas keluarga sasaran berisiko *stunting* di Desa Srimenanti berada pada kategori keluarga dengan balita, yaitu sebanyak 25 keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama intervensi masih berada pada kelompok usia anak yang rentan terhadap gangguan pertumbuhan. Sementara itu, kategori keluarga dengan kondisi ekonomi rendah tercatat sebanyak 15 keluarga, yang menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor ekonomi dengan risiko *stunting*. Adapun kategori ibu hamil sebanyak 12 keluarga menjadi perhatian penting karena fase kehamilan merupakan periode awal yang menentukan kondisi gizi anak di masa mendatang. Secara keseluruhan, distribusi data ini memperlihatkan bahwa pendataan yang dilakukan oleh KPM telah mampu mengidentifikasi kelompok

prioritas secara cukup jelas, meskipun masih diperlukan penguatan dalam hal akurasi dan pembaruan data agar intervensi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

Jika dianalisis menggunakan perspektif tata kelola publik, proses pendataan yang dilakukan KPM di Desa Srimenanti dapat dikaji melalui beberapa indikator utama, yaitu ketepatan data, keterbaruan data, jangkauan pendataan, serta koordinasi kelembagaan. Dari aspek ketepatan data, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar data yang dihimpun oleh KPM telah mencerminkan kondisi riil masyarakat, terutama karena metode yang digunakan adalah observasi langsung dan interaksi personal dengan warga. Hal ini sejalan dengan konsep tata kelola data yang menekankan pentingnya kedekatan dengan objek data agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan kontekstual (Sedarmayanti, 2020). Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam penentuan indikator keluarga sasaran, di mana beberapa kader lebih menitikberatkan pada kondisi ekonomi, sementara yang lain lebih fokus pada aspek kesehatan ibu dan anak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa standar operasional belum sepenuhnya dipahami secara seragam di tingkat pelaksana.

Dari aspek keterbaruan data, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan data belum selalu mengikuti dinamika perubahan kondisi keluarga di lapangan. Meskipun secara formal pendataan dilakukan setiap tiga bulan, namun dalam praktiknya pembaruan sering kali bersifat reaktif, yaitu dilakukan ketika ada kebutuhan pelaporan atau program tertentu. Padahal, dalam teori administrasi publik, data yang baik harus bersifat *up to date* agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat (Mardiasmo, 2021). Keterlambatan pembaruan data ini menyebabkan adanya selisih antara kondisi riil masyarakat dengan data yang tersedia, sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran intervensi program *stunting*. Dengan kata lain, persoalan bukan terletak pada frekuensi pendataan, tetapi pada konsistensi dalam memperbarui data secara berkelanjutan.

Gambar 2. Frekuensi Pendataan dan Pembaruan Data oleh KPM di Desa Srimenanti



Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2026

Diagram di atas menunjukkan bahwa kegiatan pendataan dilakukan sebanyak empat kali dalam satu tahun, sementara pembaruan data yang bersifat insidental justru lebih sering dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola pendataan masih bersifat responsif terhadap situasi di lapangan dan belum sepenuhnya terstruktur. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendataan masih perlu diperkuat agar pembaruan data dapat dilakukan secara lebih konsisten dan terjadwal.

Selanjutnya, dari aspek jangkauan pendataan, KPM di Desa Srimenanti pada dasarnya telah berupaya menjangkau seluruh keluarga yang berpotensi berisiko *stunting*. Hal ini terlihat dari cakupan pendataan yang mencakup hampir seluruh wilayah dusun, dengan prioritas pada keluarga miskin, ibu hamil, dan balita. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa keluarga yang sulit dijangkau secara optimal, terutama karena faktor mobilitas penduduk, keterbatasan waktu kader, serta kurangnya keterbukaan dari sebagian warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa jangkauan pendataan belum sepenuhnya merata, sehingga masih terdapat potensi adanya keluarga yang luput dari perhatian program. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman et al. (2021) yang menyatakan bahwa keterbatasan jangkauan pendataan menjadi salah satu faktor penyebab ketidaktepatan sasaran program sosial di tingkat lokal.

Dari aspek koordinasi kelembagaan, tata kelola pendataan di Desa Srimenanti menunjukkan adanya kerja sama antara KPM, perangkat desa, kader posyandu, dan bidan desa, namun koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal dan terstruktur. Dalam praktiknya, pertukaran informasi lebih banyak dilakukan secara informal dan situasional, bukan melalui mekanisme koordinasi rutin yang terjadwal. Hal ini menyebabkan data yang dihimpun oleh masing-masing pihak belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem yang sama. Padahal, dalam konsep *good governance*, koordinasi antaraktor menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien (Dwiyanto, 2021). Dengan demikian, lemahnya koordinasi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi kualitas data di tingkat desa.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kapasitas teknis KPM menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas pendataan. Dari total KPM yang terlibat, sebagian besar memiliki pengalaman lapangan yang cukup baik, namun belum seluruhnya mendapatkan pelatihan teknis yang memadai terkait sistem pendataan berbasis indikator *stunting*. Akibatnya, proses pencatatan data masih banyak dilakukan secara manual dan sederhana, serta belum memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Kondisi ini memperkuat temuan Pratama dan Lestari (2022) yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas kader menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan kualitas data program *stunting*. Dengan kata lain, keberhasilan pendataan di Desa Srimenanti masih sangat bergantung pada kemampuan individu kader, bukan pada sistem yang terbangun secara kuat.

Dari sisi sarana pendukung, penelitian ini menemukan bahwa pendataan masih didominasi oleh penggunaan catatan manual, seperti buku bantu dan lembar rekap sederhana. Meskipun metode ini masih dapat digunakan, namun memiliki berbagai kelemahan, seperti risiko kesalahan pencatatan, duplikasi data,

serta kesulitan dalam melakukan analisis data secara cepat. Selain itu, belum adanya sistem digital yang terintegrasi menyebabkan data yang dihimpun tidak dapat langsung diakses atau dibandingkan dengan data dari instansi lain. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pendataan di Desa Srimenanti masih berada pada tahap konvensional, sehingga perlu adanya transformasi menuju sistem berbasis digital agar lebih efektif dan efisien. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dan Nugroho (2023) yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola data program *stunting*.

Apabila ditelusuri lebih dalam, akar permasalahan tata kelola pendataan di Desa Srimenanti dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa faktor utama, yaitu faktor konseptual, faktor kapasitas, faktor sistem, dan faktor sosial. Faktor konseptual berkaitan dengan belum seragamnya pemahaman mengenai indikator keluarga sasaran. Faktor kapasitas berkaitan dengan keterbatasan keterampilan teknis KPM dalam melakukan pendataan yang sistematis. Faktor sistem berkaitan dengan belum tersedianya dukungan teknologi dan mekanisme koordinasi yang kuat. Sedangkan faktor sosial berkaitan dengan tingkat keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi. Keempat faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi kualitas tata kelola pendataan secara keseluruhan, sehingga perbaikannya harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial.

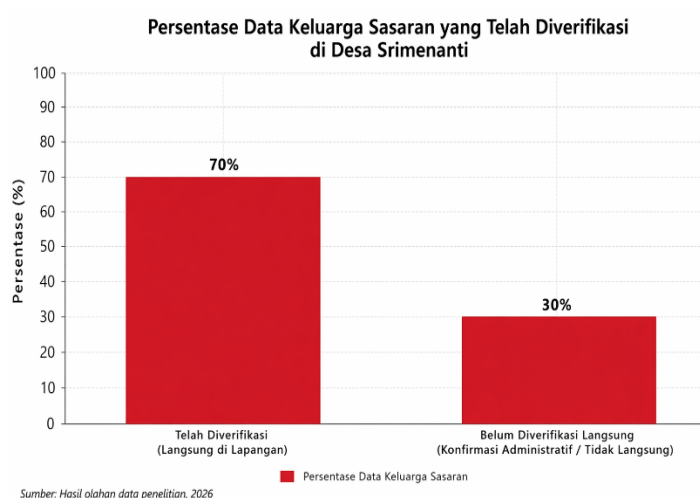
Sebagai gambaran empiris, dari hasil pengamatan terhadap keluarga sasaran, ditemukan beberapa kondisi yang berulang, seperti ibu hamil yang belum rutin melakukan pemeriksaan kehamilan, balita yang kehadirannya di posyandu masih rendah, serta keluarga yang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan gizi dan sanitasi. Data ini menunjukkan bahwa pendataan yang dilakukan KPM sebenarnya telah mampu mengidentifikasi kelompok rentan secara cukup baik. Namun, tanpa pengelolaan data yang lebih sistematis dan terintegrasi, informasi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat. Dengan demikian, permasalahan utama bukan pada ketersediaan data, melainkan pada bagaimana data tersebut dikelola dan digunakan secara optimal.

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pendataan keluarga sasaran oleh KPM di Desa Srimenanti telah berjalan dan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung program penanggulangan *stunting*, namun kualitasnya masih belum optimal. Permasalahan utama terletak pada belum seragamnya indikator pendataan, keterbatasan kapasitas kader, lemahnya sistem pendukung, serta belum optimalnya koordinasi antaraktor. Kondisi ini menyebabkan data yang dihasilkan belum sepenuhnya konsisten, mutakhir, dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh, baik melalui peningkatan kapasitas KPM, penguatan sistem pendataan berbasis digital, maupun peningkatan koordinasi lintas sektor, agar tata kelola pendataan dapat benar-benar menjadi fondasi yang kuat dalam penanggulangan *stunting* di tingkat desa.

2. Proses Verifikasi Data Keluarga Sasaran oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa Srimenanti, Lampung Timur

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Srimenanti, proses verifikasi data keluarga sasaran dalam program penanggulangan *stunting* merupakan tahapan yang sangat krusial setelah kegiatan pendataan dilakukan. Verifikasi tidak hanya berfungsi sebagai proses pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan, tetapi juga menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Dalam praktiknya, verifikasi dilakukan oleh KPM dengan melibatkan beberapa pihak lain, seperti bidan desa, kader posyandu, serta perangkat desa, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan penilaian lebih lanjut. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa sekitar **70% data keluarga sasaran telah melalui proses verifikasi langsung di lapangan**, sementara sisanya masih mengandalkan konfirmasi administratif atau informasi tidak langsung.

Gambar 3. Persentase Data Keluarga Sasaran Yang Telah Diverifikasi Di Desa Srimenanti



Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2026

Diagram batang di atas menunjukkan bahwa sebagian besar data keluarga sasaran di Desa Srimenanti telah melalui proses verifikasi langsung di lapangan, yaitu sebesar 70%, sedangkan 30% sisanya masih mengandalkan verifikasi administratif atau informasi tidak langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kader Pembangunan Manusia (KPM) telah berupaya melakukan verifikasi secara faktual untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat. Namun demikian, belum meratanya proses verifikasi mengindikasikan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan verifikasi secara menyeluruh.

Jika dikaitkan dengan teori tata kelola publik, verifikasi data merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas, di mana setiap data yang digunakan dalam program publik harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Mardiasmo, 2021). Oleh karena itu, verifikasi lapangan menjadi langkah krusial dalam meningkatkan kualitas data dan menghindari kesalahan dalam penentuan sasaran program. Temuan ini juga menunjukkan bahwa proses verifikasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam pelaksanaan intervensi, terutama apabila data yang digunakan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual masyarakat.

Secara prosedural, proses verifikasi di Desa Srimenanti dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Verifikasi administratif dilakukan dengan mencocokkan data yang telah dikumpulkan dengan dokumen yang tersedia, seperti data kependudukan desa, catatan posyandu, serta laporan dari tenaga kesehatan. Sementara itu, verifikasi faktual dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah keluarga sasaran untuk memastikan kondisi sebenarnya, seperti status gizi anak, kondisi lingkungan rumah, serta pola asuh dan konsumsi keluarga. Dari hasil observasi, pendekatan verifikasi faktual dinilai lebih akurat karena memungkinkan KPM melihat langsung kondisi keluarga, meskipun membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan prinsip verifikasi data dalam administrasi publik yang menekankan pentingnya validasi lapangan sebagai bentuk akuntabilitas data (Mardiasmo, 2021).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi di Desa Srimenanti belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan konsisten. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan waktu dan sumber daya KPM dalam melakukan verifikasi secara menyeluruh. Dalam beberapa kasus, verifikasi hanya dilakukan pada keluarga yang dianggap memiliki tingkat risiko tinggi, sementara keluarga lain hanya diverifikasi secara administratif. Kondisi ini menyebabkan adanya potensi ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil di lapangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses verifikasi masih bersifat selektif dan belum mencakup seluruh data secara merata, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas informasi yang digunakan dalam program *stunting*.

Dari aspek koordinasi, penelitian ini menemukan bahwa proses verifikasi sebenarnya melibatkan beberapa pihak, namun koordinasinya belum berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. KPM sering kali melakukan verifikasi secara mandiri, kemudian hasilnya disampaikan kepada pihak desa atau tenaga kesehatan tanpa adanya forum khusus untuk membahas hasil verifikasi secara bersama. Padahal, dalam konsep *good governance*, koordinasi lintas sektor merupakan elemen penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program publik (Dwiyanto, 2021). Ketidakteraturan koordinasi ini menyebabkan hasil verifikasi belum selalu dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa belum adanya sistem integrasi data menjadi salah satu hambatan dalam proses verifikasi. Data yang dimiliki oleh KPM, pemerintah desa, dan tenaga kesehatan sering kali berada dalam sistem yang berbeda, sehingga proses pencocokan data menjadi lebih sulit dan memakan waktu. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya perbedaan data antara catatan KPM dengan data posyandu, terutama terkait jumlah balita berisiko *stunting*. Kondisi ini menunjukkan bahwa verifikasi tidak hanya menghadapi kendala di lapangan, tetapi juga pada aspek sistem informasi yang belum terintegrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dan Nugroho (2023) yang menyatakan bahwa kurangnya integrasi sistem data menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas verifikasi dalam program sosial.

Dari sisi kapasitas pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan KPM dalam melakukan verifikasi data masih bervariasi. Sebagian KPM sudah mampu melakukan verifikasi dengan cukup baik, terutama dalam hal observasi kondisi keluarga dan pencatatan hasil temuan. Namun, masih terdapat kader yang belum sepenuhnya memahami indikator verifikasi secara detail, sehingga proses verifikasi cenderung dilakukan secara umum dan kurang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan teknis terkait verifikasi data masih perlu ditingkatkan agar seluruh KPM memiliki standar kemampuan yang sama. Dalam konteks ini, kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas verifikasi data di tingkat desa.

Selain faktor teknis, penelitian ini juga menemukan adanya faktor sosial yang memengaruhi proses verifikasi. Beberapa keluarga sasaran menunjukkan sikap kurang terbuka ketika dilakukan verifikasi, terutama terkait kondisi ekonomi atau pola konsumsi makanan. Dalam beberapa kasus, keluarga cenderung memberikan informasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Situasi ini membuat proses verifikasi menjadi lebih kompleks, karena KPM harus mampu membangun kepercayaan dengan masyarakat agar memperoleh data yang valid. Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi data tidak hanya bergantung pada prosedur teknis, tetapi juga pada kemampuan sosial dan komunikasi kader dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Jika dianalisis lebih dalam, akar permasalahan dalam proses verifikasi data di Desa Srimenanti dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek utama. Pertama, aspek sistem, yaitu belum adanya mekanisme verifikasi yang terstandar dan terintegrasi. Kedua, aspek kapasitas, yaitu keterbatasan kemampuan teknis KPM dalam melakukan verifikasi secara mendalam. Ketiga, aspek koordinasi, yaitu belum optimalnya kerja sama antar pihak dalam proses verifikasi. Keempat, aspek sosial, yaitu tingkat keterbukaan masyarakat yang masih bervariasi. Keempat aspek ini saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas proses verifikasi secara keseluruhan.

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data administratif dengan keadaan sebenarnya di masyarakat. Dalam beberapa kasus, ditemukan keluarga yang secara data tidak termasuk kategori berisiko *stunting*, namun setelah dilakukan pengecekan langsung ternyata memiliki kondisi yang cukup rentan, seperti pola makan anak yang tidak teratur serta lingkungan rumah yang kurang mendukung dari sisi sanitasi. Di sisi lain, terdapat pula keluarga yang sebelumnya tercatat sebagai sasaran prioritas, tetapi setelah dilakukan verifikasi ulang justru menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan data awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses verifikasi memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki kualitas data serta memastikan ketepatan sasaran program. Tanpa adanya verifikasi yang dilakukan secara menyeluruh, data yang digunakan berpotensi tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga dapat memengaruhi ketepatan dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses verifikasi data keluarga sasaran oleh KPM di Desa Srimenanti telah dilakukan, namun belum sepenuhnya optimal. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan sumber daya, belum adanya sistem yang terintegrasi, serta lemahnya koordinasi antar pihak. Kondisi ini menyebabkan verifikasi belum mampu menjamin sepenuhnya keakuratan data yang digunakan dalam program penanggulangan *stunting*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek sistem verifikasi, peningkatan kapasitas KPM, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar proses verifikasi dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan data yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pendataan keluarga sasaran oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa Srimenanti dalam penanggulangan *stunting* telah berjalan secara aktif melalui pendekatan langsung ke masyarakat, seperti kunjungan rumah dan pemantauan posyandu. Pendataan juga telah dilakukan secara berkala dan mampu mengidentifikasi kelompok prioritas, seperti balita, ibu hamil, dan keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Namun demikian, kualitas tata kelola pendataan masih belum optimal karena adanya ketidakkonsistenan dalam penentuan indikator sasaran, keterbatasan kapasitas teknis kader, serta belum tersedianya sistem pendataan yang terintegrasi dan berbasis digital. Selain itu, aspek keterbaruan data dan koordinasi antar pihak juga belum berjalan secara maksimal, sehingga data yang dihasilkan belum sepenuhnya konsisten, mutakhir, dan terstandarisasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Selanjutnya, proses verifikasi data keluarga sasaran oleh KPM di Desa Srimenanti telah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu verifikasi administratif dan verifikasi faktual, dengan sebagian besar data telah diverifikasi langsung di lapangan. Proses ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan waktu dan sumber daya, belum optimalnya koordinasi antar pihak, serta belum adanya sistem integrasi data yang memadai. Selain itu, proses verifikasi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti tingkat keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi. Kondisi tersebut menyebabkan verifikasi belum sepenuhnya mampu menjamin keakuratan data secara menyeluruh, sehingga masih terdapat potensi ketidaktepatan dalam penentuan sasaran program penanggulangan *stunting*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah desa dan pihak terkait memperkuat tata kelola pendataan dan verifikasi melalui peningkatan kapasitas KPM secara berkelanjutan, khususnya

dalam pemahaman indikator *stunting* dan teknik pendataan berbasis sistem. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem pendataan dan verifikasi yang terintegrasi dan berbasis digital untuk meningkatkan akurasi, keterbaruan, serta kemudahan akses data antar lembaga. Penguatan koordinasi lintas sektor juga perlu dilakukan secara lebih terstruktur melalui forum rutin agar hasil pendataan dan verifikasi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan kebijakan. Di sisi lain, pendekatan sosial kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan guna membangun kepercayaan dan keterbukaan, sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan mampu mendukung efektivitas program penanggulangan *stunting* secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2022). *Kebijakan publik dan implementasinya dalam pembangunan daerah*. Jakarta: Kencana.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). *Strategi nasional percepatan penurunan stunting 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Profil statistik kesehatan Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handayani, R., & Putra, A. (2022). Evaluasi verifikasi data keluarga sasaran dalam program percepatan penurunan stunting. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 145–158. <https://doi.org/10.31289/jap.v13i2.5678>
- Hidayat, T., & Susanti, D. (2022). Analisis efektivitas program penanggulangan stunting berbasis desa di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(2), 123–134. <https://doi.org/10.15294/kemas.v18i2.12345>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Pedoman konvergensi pencegahan stunting di desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2022*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kurniawan, A., & Fitriani, N. (2023). Peran data dalam meningkatkan akurasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan stunting. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(1), 45–58. <https://doi.org/10.22146/jkap.67890>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pratama, R., & Lestari, D. (2022). Peran Kader Pembangunan Manusia dalam peningkatan akurasi data keluarga berisiko stunting di desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 35–47. <https://doi.org/10.31258/jkp.v11i1.1234>
- Putri, M., & Ramadhan, A. (2021). Evaluasi implementasi program konvergensi stunting di tingkat desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3), 210–223. <https://doi.org/10.22146/jsp.56789>

- Rahman, A., Suryadi, B., & Putri, C. (2021). Integrasi sistem data dalam program penanggulangan stunting di tingkat daerah. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 9(3), 201–210. <https://doi.org/10.20473/jaki.v9i3.2021>
- Sari, M., & Nugroho, H. (2023). Transformasi digital dalam tata kelola data program stunting di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 67–80. <https://doi.org/10.31113/jian.v19i1.4567>
- Sedarmayanti. (2020). *Manajemen sumber daya manusia reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulaiman, R., & Yanti, E. (2022). Penguatan kapasitas kader dalam program pencegahan stunting berbasis masyarakat. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 10(1), 55–66. <https://doi.org/10.20473/jaki.v10i1.2022>
- Wahyuni, S., & Kurniawan, B. (2024). Tata kelola data dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 89–102. <https://doi.org/10.31289/jap.v14i1.8910>
- Wibawa, S. (2020). *Administrasi publik kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuliana, S., & Hidayat, R. (2024). Analisis kebijakan berbasis tata kelola data dalam percepatan penurunan stunting. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.30656/jakp.v15i1.7890>